

ISLAM DAN DEMOKRASI
(Studi Pemikiran Demokrasi Ekonomi Menurut Bung Hatta)



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarata
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

BUBUN SAHBAN FARID MARUP
NIM: 9952 2893
STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004

Drs. H. Subagyo, M.Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Bubun Sahban Farid M

Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama

: Bubun Sahban Farid Marup

NIM

: 9952 2893

Jurusan

: Perbandingan Agama

Judul Skripsi: **Islam dan Demokrasi (Studi Pemikiran Demokrasi Ekonomi**

Menurut Bung Hatta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut dimunagaskan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04-07-2004

Pembimbing I

~~Drs. Subagyo, M.Ag~~

~~Nip: 150234514~~



PENGESAHAN
Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/966/2004

Skripsi dengan judul : *Islam dan Demokrasi (Studi Pemikiran Demokrasi Ekonomi Menurut Bung Hatta)*

Diajukan oleh :
1. Nama : Bubun Sahban Farid Marup
2. Nim : 99522983
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : PA

Telah dimunqosyahkan pada hari: Selasa, tanggal: 27 Juli 2004 dengan nilai: () dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang : Drs. Moh. Damami, M.Ag NIP. 150202822
Sekretaris Sidang : Drs. Rahmat Fajri, M.Ag NIP. 150275041

Pembimbing/Mengangkap Penguji : Drs. H. Subagyo, M.Ag NIP. 150234514

Penguji I : Drs. A. Singgih Basuki, MA NIP. 150210064
Penguji II : Ustadzi Hamzah, M.Ag NIP. 150298987

DEK AN : Yogyakarta, 27 Juli 2004
Dekan : Drs. P.M. Fahmie, M.Hum NIP. 150088748





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Harta di dunia ini tidak ada yang kekal, yang kekal hanya harta ilmu dengan pengetahuan serta ibadah. Itu memperkuat semangatku belajar dan barang kali menamakan rasa tanggung jawab dalam tiraku yang waktu itu belum atau insyaf benar, masih terbemam di bawah sadar.

MOTTO

PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini saya persembahkan :

Alma mater tercinta

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang telah membuka cakrawala ilmu sebagai bekal dalam menggalih

dan menempuh arti dan makna kehidupan yang pana

3

Kedua orang tua

Lili Sharif Hidayat dan Ibunda Eti Haryati

Pengorbanan tiada henti, kasih sayang yang telah dan akan

diberikan, tak mampu anakmu membalasnya.

Do'a yang terpanjat dari lubuk hati, terasa mendamikan jiwa raga

anakmu. Kesabaranmu yang selalu nampak, buahkan kejayaan

dalam langkahku.

Kau didik anakmu untuk mengetahui apa yang aku tidak tahu.

Tulisan sederhana ini terwujud sebagai tanda cinta kasih ananda.

Tu' adik-adikku: Ana Ansorriah, Anisa Istiqomah W,

Fahmi Abdullah Al-faruq, Melisa Restu Faujiah

Tu' adindaku: Vina Nailul Munna

Dari studi pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa demokrasi ekonomi Bung Hatta merupakan demokrasi ekonomi yang berdasarkan asas tolong menolong. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia senantiasa dijiwai oleh *"kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas serta kegotong royongan"*. Dalam Islam sendiri diajarkan bahwa bermuamalah asas tolong menolong harus dipraktikkan. Terutama dalam hal ini adalah tentang bagaimana pengolaan harta. Islam mengharuskan riba dan *menghalaikan* tolong menolong. Sejalan dengan itu Hatta juga menawarkan konsep kerjasama dalam usaha ekonomi dan lahiriah koperasi. Dengan demikian, pemikiran Hatta tentang demokrasi ekonomi sejalan dengan ajaran Islam. Dari sini, maka tidaklah berlebihan jika Hatta digolongkan sebagai seorang intelektual muslim, meskipun beliau sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai intelektual muslim.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut penulis telah melakukan studi pustaka dari berbagai karya baik dari Bung Hatta sendiri ataupun karya lain yang ditulis orang lain yang berisi mengenai Bung Hatta khususnya demokrasi ekonomi serta buku keislaman yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam membahas permasalahan-permasalahan itu penulis menggunakan pendekatan historis yang kemudian dianalisa menggunakan metode deduktif dan induktif serta menginterpretasikan sesuai kemampuan penulis.

Sosok Bung Hatta sebagai bapak proklamator negara RI tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Berkat jasa beliau terhadap bangsa ini yang membuat beliau dianugerahi dan dihormati sebagai seorang tokoh nasional. Bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran beliau tentang demokrasi terutama demokrasi ekonomi telah membawa bangsa ini maju selangkah dibidang peraturan perkonomian. Lihat saja UUD 45 pasal 33, yang merupakan hasil dari pemikirannya. Koperasi merupakan wujud nyata dari pemikirannya sebagai tokoh nasional sekaligus seorang muslim yang ta'at. Namun menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa Bung Hatta lebih dikenal sebagai tokoh nasional bukan intelektual muslim, mengingat hasil pemikirannya tentang demokrasi ekonomi. Untuk itulah dalam tulisan ini ingin mengungkap beberapa permasalahan tentang Bung Hatta di antaranya; bagaimana sebenarnya demokrasi ekonomi kerakyatan Bung Hatta dan apa korelasi antara demokrasi Bung Hatta dengan demokrasi ekonomi Islam khususnya di Indonesia.

ABSTRAK

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan setitik ilmunya bagi hambanya yang *dlaili*. AtasNya-lah penulis mampu menuntaskan tugas dalam penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada Rasulullah saw, suri tauladan yang telah menghadirkan cahaya di muka bumi. Tidak lupa do'a untuk keselamatan keluarganya, para sahabatnya dan segenap muslimin-muslimat yang setia kepadanya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Perbandingan Agama di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Subagyo, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing tunggal, yang telah memberi bimbingan, dorongan dan arahan dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.



KATA PENGANTAR

Bubun Sahban Farid Marup

Penulis
Yogyakarta, 1 Juni 2004

- penyempurnaan lebih lanjut.
- dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan masukan guna khususnya di Indonesia. Namun penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh memandang Bung Hatta dan manfaatnya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa
- Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini menambah nuansa baru dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat ditulis satu persatu.
- saenit* anu bageur. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses Osteo tea, atas kesediaannya menjadi pembahas dalam seminar. Lies teman maju. Zamroni, Burhan Fahmi dan Sudiyanto atas pinjaman bukunya. Kokom, 21, yang selalu menghidirkan keceriaan dan motivasi untuk terus melangkah
5. Terimakasih untuk sahabat-sahabat di: Galuh Ciamis, HMI, PA 99, KKN Argo-motivasi dan kesabarannya dalam mendampingi penulis.
 4. Keluarga di Banjar-Ciamis, terimakasih tiada hentinya atas doa dan dukungan maupun dorongan baik secara moril maupun material. Nailul Munna atas doa, membantu dalam perolehan data guna penyelesaian skripsi ini.
 3. Seluruh Dosen dan kepala serta karyawan TU di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Kolese Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Hatta Yogyakarta, Perpustakaan Penda Yogyakarta. Yang telah sampai terselesaikannya skripsi ini. Kepala dan karyawan: Perpustakaan UPT jurusan Perbandingan Agama yang turut membantu dalam proses penyusunan

30 C. Arah Pemikiran dan Karya-Karya-Karya Bung Hatta

25 2. Pendidikan Umum

24 1. Pendidikan Islam

24 B. Latar Belakang Pendidikan

21 A. Latar Belakang Keluarga

21 **BAB II : BIOGRAFI SINGKAT BUNG HATTA**

19 G. Sistematika Pembahasan

16 F. Metode Penelitian

13 E. Kerangka Teoritik

12 D. Telaah Pustaka

12 C. Tujuan dan Kegunaan

11 B. Perumusan Masalah

1 A. Latar Belakang Masalah

BAB I : PENDAHULUAN

ix DAFTAR ISI

vii KATA PENGANTAR

vi ABSTRAKSI

v HALAMAN PERSEMBAHAN

iv HALAMAN MOTO

iii HALAMAN PENGESAHAN

ii HALAMAN NOTA DINAS

i HALAMAN JUDUL

Halaman

DAFTAR ISI

CURRICULUM VITAE

DAFTAR PUSTAKA 97

- B. Saran dan Kritik 96
- A. Kesimpulan 95

BAB V : PENUTUP 95

- Indonesia 92
- B. Relevansi Demokrasi Ekonomi untuk Pembangunan Ekonomi Islam 84

- A. Analisis Demokrasi Ekonomi Bung Hatta Dengan Ekonomi Islam 84

HATTA DAN EKONOMI ISLAM 84

BAB IV : ANALISIS TERHADAP DEMOKRASI EKONOMI BUNG

- C. Ekonomi dalam Islam 74

- B. Demokrasi Ekonomi Bung Hatta 65

- 3. Demokrasi Menurut Bung Hatta 54

- 2. Keduudukan Demokrasi Dalam Islam 51

- 1. Demokrasi Secara Umum dan Islam 41

- A. Demokrasi Menurut Bung Hatta 41

DAN EKONOMI ISLAM 41

BAB III : PEMIKIRAN DEMOKRASI EKONOMI BUNG HATTA

² William Ebestein, "Democracy" dalam William d. Hasley dan Bernard Johnston (Eds) Collier's Encyclopedia, (New York: Macmillan Educational Company, 1988), VIII: 75

¹ *The New Encyclopedia Britannica*, Vol. 4, Micropadia, Ready Reference Encyclopedia Britania Inc. (Chicago: University of Chicago Press, 1988), hlm. 5

sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Karena beberapa rezim kemapanan dari pada demokrasi. Mereka tetap menggunakan demokrasi tuntutan yang terus meningkat walaupun beberapa rezim lebih mengedepankan untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap demokratisasi ini mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan ini.

yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasa warsa abad 20 dunia, sehingga wacana demokrasi dan demokratisasi menjadi suatu fenomena Pada perkembangannya, istilah ini telah menyebar kesegala penjuru *Government of the people, by the people, for the people.*²

pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, seperti apa yang di rumuskan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln, (*kekusaan*), yang dalam wacana politik modern demokrasi di definisikan oleh rakyat, berasal dari bahasa Yunani Demos (*rakyat*) dan Kratos untuk dipahami arti dan maknanya, secara literal, demokrasi berarti kekuasaan Dalam wacana politik istilah demokrasi telah menjadi istilah penting

A. Latar Belakang Masalah

PENDAHULUAN

BAB I

otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahanya penganut sistem demokrasi atau, sekurang-kurangnya sedang berproses kearah itu.³

Kuatnya tuntutan demokrasi dan maraknya diskursus demokrasi, tidak lain adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin ketertarikan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti manusiaawi, egaliter, dan berkeadilan. Demokrasi telah di yakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominan, represif dan otoritarian.⁴

Dalam sebuah persepsi yang didasarkan pada teori Samuel P. Huntington menunjukkan bahwa lebih dari 30 Negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia Timur, Pada akhir abad ke-20 ini, telah mengalami transisi dari sistem politik non-demokrasi ke sistem politik demokrasi. Huntington menyebut kecenderungan ini sebagai "gelombang demokrasi ketiga".⁵

Gelombang ketiga demokrasi tersebut oleh Huntington disebut juga masa transisi menuju demokrasi. Ia melihat lima faktor yang secara nyata

³ Syamsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia, Bagian dan Pengalamannya*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 3

⁴ Umaruddin Masdar, *Mem baca Pikiran Gus Dur dan Amrin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 2

⁵ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. hak terjemah pada PT. Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 1995), 34

membentuk gelombang ketiga demokrasi yang membuka jalan transisi ke demokrasi.⁶

Pertama, problem legitimasi yang mendalam mengenai rezim secara meluas. Dalam keadaan seperti itu rezim otoriter sangat bergantung pada keberhasilan rezim tersebut yang biasanya sulit menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan legitimasi baik karena kegagalan ekonomi dan tergantung juga pada militer.

Kedua, terjadi pertumbuhan ekonomi dunia sejak 1960 yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berhasil meningkatkan taraf hidup, memajukan pendidikan dan memperluas basis kelas-kelas menengah di banyak negeri. Faktor-faktor itu melandasi terbentuknya sistem politik yang demokrasi.

Ketiga, perubahan doktrin dan aktivitas Gereja Katolik, sebagaimana dimanifestasikan dalam Konsili Vatikan ke-dua 1963-1965. nyata membawa pengaruh penting terjadinya proses transformasi gereja-gereja. Katolik nasional dari status quo menjadi penentang otoritarianisme. *Keempat*, perubahan kebijaksanaan politik aktor-aktor eksternal tampak memberikan dampak besar. Hal ini tampak pada masyarakat Eropa Timur, Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika belum pecah dan *Kelima*, proses “Bola salju yang menggelinding” (*snow balling*) atau efek demonstratif (*demonstration*

⁶ M. Dawan Raharjo, *Indonesia Dalam Era Transisi Menuju Demokrasi. Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Lstf, 1999), hlm. IX

effect) masa transisi yang lebih awal dalam gelombang ketiga telah menstimulasi dan menyajikan proses demokrasi.⁷

Tuntutan demokrasi dan maraknya diskursus demokrasi dalam derajat internstias yang cukup tinggi juga terjadi diberapa "negara Islam". Persoalan yang sangat menarik dalam kaitan ini dalam kenyataan bahwa kaum intelektual itu sangat terbuka menerima gagasan demokrasi modern. Fenomena ini menjadi menarik setelah beberapa abad sikap seperti itu tidak terlihat, karena adanya sikap anti Barat yang berlebihan.

Konsep pembenaran terhadap gagasan demokrasi ini, berangkat dari asumsi Islam itu tidak hanya merupakan sistem teologi⁸. Melainkan juga merupakan tatanan hidup yang global, yang mencakup nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam konteks sistem sosial, Islam tidak mengandung konsep-konsep secara detail. Ia hanya mengandung prinsip-prinsip dasar tentang sosial tersebut. Adapun konsep secara detail ini harus dirumuskan melalui ijihad ini. Ijihad ini kadang berbentuk pemikiran yang orisinal dan kadang berupa respon terhadap sistem yang ada atau ide. Ide dari luar, yang kemudian disesuaikan dengan doktrin Islam.⁹ Salah satu respon terhadap ide dari luar adalah respons terhadap konsep demokrasi.

⁷ *Ibid.*, hlm. X

⁸ Masykuri Abdilah, "Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi", (1966-1931), *Jurisdiiksi Iktisi*, Th I 1996, hlm. 18

⁹ *Ibid.*, hlm. 19

Menurut John L. Esposito dan James P. Piscatori dua Islammolog Barat,

melihat tiga nilai Islam yang dianggap berkaitan dengan demokrasi, yaitu *Syura* (musyawarah), *Ijma* (konsensus) dan *Ijtihad* (pemikiran independen),¹⁰

dalam hal ini Dawam Raharjo mengemukakan ada beberapa nilai yang harus dipertimbangkan pula, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (mencegakan yang baik dan menghilangkan yang buruk), *adl* (keadilan) dan *khalifah* (kepemimpinan).¹¹ Terbentuknya masyarakat dan negara khususnya Madinah dan pemerintahan khalifah al-Rsasyidin juga bisa menjadi pokok pembahasan mengenai demokrasi Islam.¹¹

Menurut teori Hamid Enayat, jika yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran. Islam sesuai dengan demokrasi, karena didalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan yang memihak pada satu orang atau sekelompok orang.¹²

Muhammad, seorang pemikir Islam modernis mengatakan bahwa sebagai legislatif harus benar-benar mewakili, hanya dapat dicapai melalui pemilu yang bebas, karena para anggota majelis dengan cara-cara yang memungkinkan semua orang terlibat (berpartisipasi).¹³ Sayyid Jamaluddin Al-

¹⁰ John L. Esposito dan James P. Piscatori, *Islam dan Demokratisasi*, Alih bahasa Nuri Agustina, Islam No. 4, April-Juni, 1994, hlm. 19, secara harfiah Ijtihad mengandung arti berusaha semaksimal mungkin melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Indonesia*, hlm. XX

¹² Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syiah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-abad 20*, Alih bahasa Asep Hikmat, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1998), hlm. 199

¹³ John L. Esposito dan James P. Piscatori: *Islam*, hlm. 19

Afghani dan Muhammadiyah, dua pemikir Islam kenamaan, bahkan pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang menyatakan "kehendak bebas".

Di Indonesia demokrasi juga menjadi agenda utama pemikiran para negarawan, intelektual, termasuk didalamnya para intelektual Muslim.¹⁴ Tampilnya para pemimpin serta intelektual Muslim di Indonesia dalam mendukung demokrasi karena dua alasan. *Pertama*, nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang kemasyarakatan. *Kedua*, demokrasi merupakan cara yang tepat untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat Islam adalah mayoritas sementara sistem demokrasi pada dasarnya adalah sistem kekuasaan mayoritas.¹⁵

Salah satu diantara tokoh tersebut, adalah Mohammad Hatta.¹⁶ Walaupun tidak termasuk dalam kualifikasi intelektual muslim, integritas pribadinya serta sikap kejujuran, keahlihan dan sikap demokratisnya sampai batas tertentu mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁷ Nilai Budaya Minangkabau yang egaliter dan nilai Islam modern inilah yang

¹⁴ Intelektual Muslim di sini adalah: mereka yang mengekspresikan ide-ide sistematis dalam merespon problem sosial dan kemasyarakatan dengan tetap memiliki komitmen pada nilai-nilai Islam dalam masyarakat dan negara. Lihat Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993). Alih bahasa Wahabi Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), hlm.4

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 154

¹⁶ Mohammad Hatta dikualifikasikan kedalam tokoh Nasional. Lihat Ahmad Syafiqi Mar'at, *Studi Tentang, Percairan dalam Konstituan: Islam dan Masalah Keneagaran*, Cet.1 (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 103

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 76

diintegrasikannya dengan nilai-nilai Barat berupa nasionalisme dan demokrasi sebagai sumber ilham untuk mengakkan keadilan sosial¹⁸.

Mohammad Hatta menyebut istilah "demokrasi" dengan kerakyatan atau "kedaulatan rakyat". Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat.¹⁹ Kedaulatan rakyat disini tidak hanya dalam bidang politik saja, melainkan juga dalam ekonomi: karena dalam Islam, menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial serta mewujudkan keadilan dalam setiap segi kemanusiaan dan mengahilangkan adanya citra interpretasi yang sempit dalam masalah keadilan. Usaha mewujudkan keadilan sosial dan keadilan seluruh segi kehidupan kemanusiaan yang merupakan cita-cita²⁰ "sebuah demokrasi".

Dari similah muncul cita-cita demokrasi Hatta, yaitu demokrasi sosial, demokrasi yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia,²¹ tidak dipahami dari satu segi saja, melainkan harus diartikan sebagai landasan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam beregara.

¹⁸ Ahmad Syafi'i, "Islam Sumber Demokrasi Indonesia", *Surata Muhammadiyah*, No. 18, Th Ke-84, hlm. 6

¹⁹ Mohammad Hatta, *Kecawah Indonesia Merdeka Dalam Kumpulan karyanya* 1., Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1953), hlm. 66

²⁰ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Alih Bahasa Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka 1994), hlm. 47

²¹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1966), hlm. 24

Pernakalian kedaulatan rakyat dalam dua bidang yaitu: Bidang politik dan

Bidang ekonomi, dilakukan Hatta dimaksud untuk membedakan kedaulatan

rakyat yang didam-idamkannya itu dengan demokrasi yang dilihatnya di

Eropa Barat. Sebab di Eropa Barat timbul sebagai anak dari Revolusi Perancis

1789, abad ke 18.²² Dasarnya adalah individualisme orang seorang sebas-

bebasnya selama tidak merusak orang lain, yang kemudian muncullah paham

liberalisme yang melahirkan golongan kapitalis yang menghimpit

perekonomian kelas bawah, kepincangan dari demokrasi Barat. Demokrasi

hanyalah terdapat dalam politik saja. Wujud Revolusi Perancis yang utama,

yaitu "Kemerdekaan persamaan dan persaudaraan" tidak pernah tercapai, yang

tercapai kata Hatta *politik democrat: economische democrat* bertambah

jauh.²³

Dalam pandangan Hatta, demokrasi dapat berkembang di Indonesia,

karena adanya sifat-sifat demokrasi yang terdapat pada masyarakat desa, (*desa*

demokrasi) dengan sifat utama: *pertama*, cita-cita rapat, musyawarah yang

hidup dalam sanubari rakyat Indonesia jaman dulu sampai sekarang. *Kedua*,

cita-cita masa protes yaitu hak rakyat untuk membantah secara umum segala

peraturan negeri yang dipandang tidak adil. *Ketiga*, cita-cita tolong menolong

yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia²⁴.

Dari ketiga analisis demokrasi itulah yang dipakai oleh Mohammad

Hatta untuk menyusun pemerintahan Indonesia merdeka. Di atas sendi

²² *Ibid.*, hlm: 22

²³ Mohammad Hatta, *Kearifan*..., hlm, 66

²⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi*..., hlm. 26

pertama, yaitu cita-cita rapat dan masa protes dapat ditegakkan demokrasi politik: yaitu suatu pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu badan perwakilan, sedang yang menjalankan kekuasaan pemerintahan senantiasanya takluk pada kemauan rakyat. Untuk menyusun pemerintahan seperti itu, rakyat harus mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan, yaitu hak merdeka, bersuara dan berkumpul. Di atas sendi demokrasi, yaitu tolong-menolong, dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi, tidak lagi orang seorang atau segolongan kecil yang mesti menguasai kehidupan orang banyak, melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak harus jadi pedoman pedoman perusahaan dan pengusaha.

Keyakinan Hatta terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan berdasarkan bahwa pemerintahan negara yang bersifat pemerintahan rakyat lebih kuat pertahanannya terhadap revolusi, dari pada berdasarkan pada kekuasaan golongan terkecil.²⁵ Walaupun dalam perkembangannya demokrasi mengalami pasang surut, akan tetapi Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia ada tiga, *pertama*, sosialisme Barat yang membelah prinsip-prinsip humanisme dan prinsip ini dinilai sekaligus sebagai tujuan, *kedua*, ajaran Islam yang mencerminkan kebenaran Tuhan dalam masyarakat, *ketiga*, pola kolektivitas sebagai mana terhadap di Desa-Desa di Indonesia.²⁶

²⁵ Mohammad Hatta, *Bung Hatta Berpidato, Bung Hatta Pemulis*, (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 28

²⁶ Mohammad Hatta, *Demokrasi ...*, hlm. 30

Jika dicermati lebih dalam, apa yang dikemukakan Hatta mengenai sifat-sifat demokrasi sejalan dengan ajaran Islam mengenai aspek “demokrasi”, meskipun Islam tidak menyebutkannya secara detail: *pertama*. Asas musyawarah, merupakan ajaran Islam mengenai bagaimana memutuskan perselisihan, masalah yang berkaitan dengan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa segala permasalahan akan dapat terselesaikan dengan jalan musyawarah bukan dengan kekerasan maupun peperangan. Sehingga apapun keputusannya, tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, akan tetapi keputusan tersebut benar-benar dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua pihak. *Kedua*. Bahwa semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, termasuk dalam hal ini adalah melakukan protes terhadap peraturan negeri sejauh dengan cara yang baik. Karena jika aturan itu tidak sejalan dengan tuntutan jasmani dan dorongan jiwa membuat keterkekangan jiwa. Karena Islam menghendaki adanya perpaduan yang harmonis antara tuntutan jasmani dan dorongan jiwanya dalam suatu aturan, serta menjamin kebutuhan dan tujuannya tanpa melakukan pengorbhan terhadap salah satu di antara keduanya.²⁷ *Ketiga*. Asas tolong menolong. Islam telah nyata-nyata mencampakan dan menolak riba, dan memerangi segala bentuknya. Dalam pandangan Islam kehidupan Islam tidak dapat ditenggalkan diatas satu landasan yang didalamnya terdapat asas yang bersifat riba. Islam memerangi riba dan menghidupkan semangat tolong menolong dan kasih sayang, serta adanya kenyataan dalam riba dimana pemilik modal bisa

mengambil keuntungan tanpa kerja dan tidak harus menderita kerugian. Oleh sebab itu, ekonomi negara harus ditegakkan atas asas tolong menolong dan bukan diatas riba. Asas yang ketiga inilah yang kemudian menjadi dasar demokrasi ekonomi yang dikemukakan Hatta, yang merupakan fokus dari tulisan ini.

Dengan adanya tulisan ini nantinya, penulis mengharapkan dapat menjadi bagian dari tonggak perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, meskipun Hatta sendiri belum dikategorikan sebagai tokoh Islam melainkan tokoh nasional. Justru dengan tulisan ini, akan membuka wacana pemikiran yang baru tentang keislaman (khususnya ekonomi Islam) dan memancing para ekonom Islam muda untuk lebih mencurahkan pengabdianya sesuai dengan disiplin keilmuannya dan juga seluruh pemerhati ekonomi khususnya umat Islam.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang menjadi objek penelitian skripsi adalah:

1. Bagaimana demokrasi ekonomi kerakyatan menurut Mohammad Hatta?

2. Apa korelasi gagasan demokrasi ekonomi kerakyatan Bung Hatta dengan demokrasi ekonomi Islam khususnya di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penulis skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
2. Mencari relevansi antara gagasan demokrasi kerakyatan Bung Hatta dengan demokrasi ekonomi Islam di Indonesia.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Secara umum diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dan demokrasi ekonomi yang berbasis kerakyatan yang berkeadilan sosial.
2. Bagi para perminatnya khususnya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dalam rangka pengembangan dan pendalaman materi disiplin Ilmu Perbandingan Agama.

3. Secara khusus diharapkan dapat membantu dalam memahami pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi ekonomi kerakyatan dan hubungannya dengan Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang telah membahas tentang Mohammad Hatta dan pemikirannya, salah satu di antaranya berjudul: *karya lengkap Bung Hatta Buku Kebangsaan dan Kerakyatan*, di terbitkan LP3ES. 1988. Buku ini adalah kompilasi secara komperhensif terhadap pemikiran-pemikiran Hatta di berbagai bidang, namun karena banyak ide-ide yang digali buku ini relatif kurang bisa menggali substansi pemikiran Hatta tentang demokrasi.

Buku "*Studi Percaturan dalam Konstituantente: Islam dan Masalah Kengawaran*", di tulis oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, khususnya pada pembahasan tentang pandangan "*Mohammad Hatta Tentang Pancasila*". Namun fokus kajian dari buku ini adalah pemikiran Hatta tentang ideologi Pancasila dalam relevansinya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Membahas juga didalamnya tentang demokrasi, hanya saja kajian ini lebih bersifat deskriptif tanpa banyak memberikan analisis. Selain itu pembahasannya bersifat global bahkan terkesan data tambahan dari sebuah gagasan pokok yang dikemukakan oleh pengarangnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, kajian Mohammad Hatta, terutama yang berkaitan dengan Islam dan demokrasi kerakyatan yang berkeadilan sosial menurut penulis masih dianggap relevan dan urgen. Apabila dalam konteks sistem berpolitik di Indonesia saat ini, yang lagi menuju demokrasi ide-ide Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sangat relevan untuk dikaji ulang.

E. Kerangka Teoritik

Demokrasi merupakan satu-satunya sistem politik yang paling diminati dan dipercaya secara positif oleh hampir semua kelompok masyarakat dan diseluruh dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi yang telah mewujudkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara adil, egaliter dan manusiawi²⁸.

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang didalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Karena secara universal demokrasi di definisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.²⁹

Tujuan paling hakiki dari demokrasi dengan demikian adalah membentuk sebuah sistem yang aspiratif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk, baik individu maupun anggota kelompok sosial yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi, baik sebagai sebuah sistem politik kebudayaan maupun yang termanifestasi dalam struktur masyarakat, akan mencegah kekuasaan yang otoritarian dan represif.

²⁸ Umaruddin Masdar, *Amba*, hlm. 15

²⁹ Definisi itu dirumuskan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln pada tahun 1863. Lihat William Ebstain, *Democracy*, hlm. 75

Melihat arti hakiki demokrasi ini, sesungguhnya Islam secara substansial

membaca spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak

eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek

ekonomi dan politik yang tidak bermoral.³⁰ Subtansi di tegakkannya nilai dan

praktek demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemashlahatan

umum. Dan ini secara umum dipraktikkan oleh Nabi dan al-Khulafa ar-

Rasyidin pada masa awal Islam³¹.

Dalam bukunya, "Teori Ekonomi, Politik Ekonomi Dan Orde Ekonomi".

Bung Hatta mengatakan bahwa sumber demokrasi bukan hanya dalam politik

saja tetapi juga dalam bidang ekonomi untuk kemakmuran negara. Dengan

terlaksananya demokrasi ekonomi dalam sebuah negara kemakmuran akan

menju dalam masyarakat.³²

Menurut Revisond Baswir di dalam bukunya, "Politik Ekonomi

Indonesia Baru". Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah suatu

situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan

dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, sementara

penyelenggaraan kegiatan ekonomi itu berada di bawah pengendalian atau

pengawasan anggota-anggota masyarakat. Demokrasi ekonomi yang

mendasari perlu disusunnya perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan

³⁰ Muhammad Hilmi Mahmud, *Dimagratiyah Muhammad*, (l.p. ad-Daral

Qawmiyah, 1966), hlm 39

³¹ *Ibid*, hlm 7

³² Bung Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi Dan Orde Ekonomi*, (Jakarta: Tintamas 1967), hlm. 15

atas asas kekeluargaan. Sejalan dengan itu, koperasi ditetapkan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dikembangkan di Indonesia.³³

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah atau historis, yaitu dengan membaca, menafsirkan dan mensintesa dengan menggunakan sumber dokumen masa lalu sesuai dengan situasi politik saat itu³⁴. Dengan pendekatan historis ini maka penulis disamping dalam penguaiannya bersifat deskriptif juga analitis, karena sejarah harus ditanggapi dengan kritis, dalam arti mempunyai komitmen kepada kejuanan dan tekun dalam mengenal obyeknya³⁵.

Historis yang penulis maksud adalah historis faktual artinya meneliti konsep pemikiran Bung Hatta melalui teks-teks yang beliau tulis kemudian ditafsirkan sesuai setting sosial politik pada masa itu dan mensintesakannya untuk memperoleh penjelasan obyektif dari konsep pemikiran Bung Hatta. Pendekatan historis digunakan untuk melihat dan memahami sejarah

³³Revrisond Baswir, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2000), hlm. 6-7

³⁴Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prada, 1996), hlm 52

³⁵ Kuntojowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 116

terjadinya pemikiran murni dan kehidupan Mohammad Hatta dalam konteks intelektual

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan menghimpun keterangan-keterangan dari buku sebagai literatur dalam hal ini karya-karya Bung Hatta sebagai pustaka utama (sumber primer) dan tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan maupun dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta karya-karya penulis lainnya mengenai Bung Hatta sebagai pustaka pendukung (sumber sekunder).

3. Pengolahan dan Analisis Data

Penulisan mengumpulkan data yang berhubungan dengan tema yang ditulis, kemudian menelaahnya dan diinterpretasikan sesuai wawasan penulis, sehingga diperoleh pengertian yang jelas, disertai dengan analisis deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterpretasi obyek tentang permasalahan yang diteliti. Dalam pengolahan data ini, penulis tidak terbatas mengumpulkan dan menyusun data, tetapi dengan menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

Secara fundamental, dapat dikatakan bahwa sebuah deskripsi adalah representasi obyektif terhadap permasalahan yang dikaji. Hal ini membuat suatu karya ilmiah mengalami kesulitan untuk menghindari unsur subjektivitas. Akan tetapi suatu studi dapat diterima sebagai karya ilmiah

sepanjang dimensi obyektifitas tidak terkalahkan oleh unsur subyektifitas.

Sebagaimana halnya penulisan tentang seorang tokoh, masalah yang paling sulit dihindari adalah menjaga sedapat mungkin subyektifitas penulis tidak

mewarnai uraian tentang tokoh yang bicarakan. Oleh karena itu, penulis akan

berusaha mengontrol diri untuk tidak bertindak terlalu subyektif, baik dalam

pola maupun materi deskripsi.

Data – data yang telah di kumpulkan dianalisa dengan instrumen analitis

sebagai berikut;

a) Deduktif yaitu proses berfikir dari statemen yang bersifat umum

dengan penerapan kaidah logika yang dalam pembahasan bersifat

khusus.

b) Induktif yaitu metode berfikir dengan cara membawa data yang

bersifat khusus dalam analisa pembahasan yang sifat khusus dalam

analisa pembahasan.

Analisa dalam metode ini tidak dikemukakan dalam angka-angka tetapi

dengan kata-kata atau metode kualitatif.³⁶

³⁶ Sturitsno Hadi, *Metode Penelitian Sejarah*, Jld Cet. 28 (Yogya: Adi Offset, 1995).

G. Sistematis Pembahasan

Sistem pembahasan skripsi ini dibagi lima bab dengan beberapa sub bab untuk mendapatkan hasil yang utuh sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan Sistematis Pembahasan.

Bab kedua, selayang pandang Bung Hatta yang akan memaparkan biografi singkat Bung Hatta terdiri dari: Latar belakang keluarga, sub bab kedua meliputi latar belakang pendidikan yang mempunyai dua sub anak bab yang meliputi, pendidikan Islam, pendidikan umum dan pendidikan umum, arah pemikiran dan karya-karya Bung Hatta dan diakhiri dengan Demokrasi menurut Bung Hatta.

Bab ketiga, membahas tentang demokrasi Bung Hatta dan Ekonomi menurut Islam yang dituangkan dalam beberapa bab dan sub bab diantaranya; sub bab pertama mengulas tentang gambaran umum demokrasi menurut Bung Hatta, yang dijabarkan dalam tiga anak sub bab: pertama demokrasi secara umum dan Islam, kedua kedudukan demokrasi dalam Islam, yang ketiga demokrasi menurut Bung Hatta, sub bab yang kedua menjabarkan tentang demokrasi ekonomi Bung Hatta, dan sub bab ketiga ekonomi menurut Islam

Bab keempat merupakan analisis penulis yang akan diuraikan dalam dua sub bab; pertama analisa demokrasi ekonomi Bung Hatta dengan ekonomi Islam, sub bab kedua relevansi gagasan demokrasi ekonomi Bung Hatta terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.



Bab kelima, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah yang telah dibahas oleh penulis

kerjasama. Antara pemilik modal dan pekerja sama-sama terlibat dalam mengharuskan riba untuk menghindari paksaan semangot tolong menolong dan Demikian yang dianjurkan oleh Islam dalam bermuamalah. Islam bekerja bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. didalamnya tidak ada pemilahan antara buruh dan majikan, tetapi semua sebagai wujud dari pemikiran ini lahiriah badan usaha koperasi, yang ekonomi yang mengedepankan atas asas tolong menolong dan kerjasasama Indonesia adalah: demokrasi ekonomi Bung Hatta merupakan demokrasi

2. Korelasi demokrasi ekonomi Bung Hatta dengan demokrasi Islam di sebuah keluarga. dan pekerja melainkan semuanya bekerja secara bersama-sama bagaikan melibatkan seluruh anggota tanpa adanya pemilahan antara pemilik modal disusun sebagai usaha bersama sebuah persekutuan usaha, dengan kegotong royongan. Untuk itulah Hatta berpendapat bahwa perekonomian penuh dengan rasa kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas serta semangot tolong menolong. Hal ini berasal dari sanubari rakyat Indonesia yang
1. Demokrasi ekonomi Bung Hatta adalah demokrasi yang berlandaskan asas kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, penulis dapat memberikan

A. Kesimpulan

PENUTUP

BAH V

pengelolaan usaha, sehingga untung atau rugi dirasakan semua pihak maka dapat dilihat pemikiran Bung Hatta sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini bisa jadi karena Bung Hatta sebagai orang Islam, kehidupan dan pemikirannya senantiasa disemangati oleh nilai Islam sadar atau tidak sadar. Tidaklah berlebihan kiranya bila Bung Hatta sebenarnya merupakan intelektual muslim.

B. Saran dan Kritik

1. Mesti dalam ranah pemikiran Islam dan Demokrasi bukan termasuk tema yang baru. Akan tetapi tema ini masih cukup menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian terhadap demokrasi ekonomi Islam dan demokrasi ekonomi Bung Hatta ini masih tetap dibutuhkan selama masih ada celah dan ruang untuk menyelaminya dari sudut pandang yang berbeda dan tentunya menggunakan perspektif yang lebih kaya.
2. Setelah mengadakan penelitian terhadap pemikiran demokrasi Bung Hatta, meskipun banyak ditemukan konsep yang berkaitan dengan pemikiran demokrasi Bung Hatta. Yang sangat disayangkan oleh penulis, demokrasi Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan hanya sebatas konsep, realita yang ada jauh dari cita-cita yang diharapkan oleh beliau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit; CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Abdillah, Masykuri. *Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (1966-1931). Jordsika Edisi. Th I. 1996
- Afandi, Arief. *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amn Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Altan, *Pemikiran dan Proses Politik*, pengantar untuk buku demokrasi dan proses politik, seri prisma. Jakarta: LP3ES, 1986.
- al-Maududi, Abul A'la. *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam; dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Alih bahasa, Abdullah Suhaili. Bandung: PT Almaarif, 1984.
- an-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam; pilihan setelah kegagalan sistem kapitalis dan sosialia*, Alih bahasa: Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- An-Nabami, Taquuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Artani, Riza Noer. *Demokrasi Indonesia Konteporer*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Arief, Sritua, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: UMS, 2001
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*. Jakarta: PT Midas Surya Grafido, 1996
- Baswir, Reviend. *Politik Ekonomi Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- , *Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pengantar Sritua Arief*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- , *Ekonomi Manusia dan Etika, kumpulan esai-esai terpilih*. Yogyakarta: BPPE, 1993.
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Carter, April. *Otoritas dan Demokrasi*; Alih bahasa Sahat Simamora. Jakarta; Rajaeawali Press, 1985.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa: Ikhwani Abidin. Jakarta: Gemma Insani Press, 2001.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar*, Robert A. Dahl; alih bahasa Ahmad Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1922.
- Ebenstein, William. *Isme-isme Dewasa ini*, Alih bahasa Jemadu. Jakarta; Erlangga, 1990.
- , "Democracy" dalam William d. Hasley dan Bernard Johnston (Eds). *Collier's Encyclopedia*, New York: Macmillan Educational Company, 1988.
- Enayat, Hamid. *Alih Reaksi Politik Sunni dan Syiah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-abad 20*. bahasa Asep Hikmat. Bandung: Penerbit Pustaka, 1998.
- Esposito, Jhon L dan Piscatori, James P. *Islam dan Demokratisasi*. Alih bahasa Nurul Agustina, Islam No. 4. April-Juni, 1994.
- Fatah, Eep Saetulloh. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hadi, Sturisno. *Metode Penelitian Sejarah*, jld Cet. 28. Yogya: Adi Offset, 1995.
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi Di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995.
- Hatta, Muhammad. dan Negara Hukum, *Kompas*. Tanggal 1 september 1975 dalam Mohammad Hatta, menuju Negara Hukum, Jakarta: Indayu, 1980
- Hatta, Muhammad, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Jakarta: Perpusustakaan Perguruan Kementrian, 1945.
- , *Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 1945*. " *Dalam Sistem Ekonomi dan Demokrasi*, editor Sri Edi Swasono. Jakarta: VI Press, 1987.
- , *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara, 1966.
- , *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Fasco, 1960.
- , *Ilmu dan Agama*. Jakarta: Yayasan Indayu, 1983.

- , *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- , *Kearah Indonesia Merdeka Dalam Kumpulan karangan I*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1953.
- , *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Indayu Press, 1993
- , *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta; PKPN, 1971.
- , *Memoir*. Jakarta: Tinta Mas, 1978
- , *Perkembangan Fahaman Pancasila, dalam kumpulan pidato II*. Jakarta: Indayu Press, 1993.
- , *Bung Hatta Berpidato, Bung Hatta penulis*. Jakarta: Mutiara, 1979.
- , *Berpartisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Idayu 1980
- , *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi*, Jakarta: Tintamas, 1967
- , *Koperasi dan Pembangunan*, Jakarta: Indayu, 1956
- , *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1953
- , *Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian*, Jakarta: Tintamas, 1957
- , *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Tintamas, 1980
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*, Alih bahasa. Muhammadiyah Abdul Ghoftar E.M. Bandung: Mizan, 1996.
- Islahi, A. A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj Anshari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997
- Karim, Adiwarmman Azwar. *Ekonomi Islam; suatu kajian kontemporer*. Jakarta: Gemma Insani Press, 2001.
- Karim, Adiwarmman Azwar. *Sejarah Ekonomi Islam*, Alih bahasa: Tim III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogy, 1994

- , *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Lubis, Suhrwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafa'i. *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituan: Islam dan Masalah Kenegaran*, Cet. I. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusian, Mambangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, cet II, 2003.
- , *Islam, Doktrin dan Peradaban: sebuah Telaah kritis tentang kelmanan. Kemanusian dan kemoderanan*, cet II. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahmud, Muhammad Hilmi. *Dimugratiyyah Muhammadiyah*, t.p. ad-Daral Qawmiyyah, 1966.
- Majid, M. Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*. Kairo al-Katib al-Arabi, 1963
- Neor, Deliar. *Gerakan Modern Islam Indonesia, 1940-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- , *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990
- , *Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan: 2001.
- Peoradarminto, Wjs. *Kamus umum, Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Quthb, Sayyid. *Keadialan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1994
- Raharjo, M. Dawan. *Indonesia Dalam Era Transisi Menuju Demokrasi*. Sebuah Pengantar. Jakarta: Lstf, 1999.
- Rais, Amin. *Demokrasi dan Proses Politik*, pengantar untuk buku *Demokrasi dan Proses*, Seri Prisma. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada, 1996.

- Rose, Mavis. *Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Sargent, Lyman Tower. *Contemporary Political Ideologies*, A. Comparatif Analysis, Chicago: The Dorsey Press Sixth Edition, 1984.
- Sastraatmaja, Entang. *Ekonomi Dan Pembangunan; Pengalaman Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1986.
- Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Swasano, Sri-Edi. *Koperasi Di Dalam Ekonomi Indonesia*, Cet II. Jakarta: UI-Press, 1987.
- , *Membangun Sistem Ekonomi Nasional; Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI-Press, 1987.
- Syafi'i, Ahmad. "Islam Sumber Demokrasi Indonesia", *Suara Muhammadiyah*. No. 18, Th Ke-84.
- Syed Nawab Hadier Nagvi, *Mengaggas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa, M. Saiful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Taopan, M. *Demokrasi Pancasila; Analisa Konsepsional Aplikasi*. Kupang: Tiaan Grafika, 1989.
- The New Encyclopedia Britania, Vol. 4. Micropadia, Ready Reference Encelopedia Britania Inc, Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan, cet I, 2002